

# Sistem Keuangan Desa, Kejelasan Sasaran Anggaran, Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kairil Anwar<sup>1</sup>

Sulkiah<sup>2</sup>

Ikhwan Wadi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Gunung Rinjani

\*Correspondences: [khairilan170@gmail.com](mailto:khairilan170@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh sistem keuangan desa, kejelasan sasaran anggaran, dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa se Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timurr. Jumlah sampel sebanyak 75 orang yang ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Data dikumpulkan melalui metode kuesioner. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: *Village Financial System, Clarity of Budget Targets, Transparency, Accountability of Village Fund Management*

## *The Influence of Village Financial System, Clarity of Budget Targets and Transparency on Accountability of Village Fund Management*

## ABSTRAK

*This study aims to determine the effect of the village financial system, clarity of budget targets, and transparency on the accountability of village fund management in villages in Pringgabaya District, East Lombok Regency. The number of samples was 75 people determined using the purposive sampling method. Data were collected through the questionnaire method. The analysis technique was carried out using multiple linear regression analysis. The results of the study indicate that the village financial system has a positive effect on the accountability of village fund management. Clarity of budget targets has a positive effect on the accountability of village fund management. Transparency has a positive effect on the accountability of village fund management.*

Keywords: *Village Financial System, Clarity of Budget Targets, Transparency, Accountability of Village Fund Management*



e-ISSN 2302-8556

Vol. 34 No. 9  
Denpasar, 30 September 2024  
Hal. 2225-2236

DOI:  
10.24843/EJA.2024.v34.i09.p05

**PENGUTIPAN:**  
Anwar, K., Sulkiah, & Wadi, I. (2024). Sistem Keuangan Desa, Kejelasan Sasaran Anggaran, Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(9), 2225-2236

**RIWAYAT ARTIKEL:**  
Artikel Masuk:  
15 Juni 2024  
Artikel Diterima:  
26 Juli 2024

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>

## PENDAHULUAN

Pembangunan berbasis desa menjadi fokus pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Pembangunan berbasis perdesaan memiliki peranan penting dan perlu untuk memperkuat fondasi perekonomian negara. Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dianggap sebagai tonggak penting bagi pemerintah desa, karena memberikan landasan baru untuk mewujudkan pembangunan dari bawah ke atas serta memberikan kewenangan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya (UU No 6, 2014) Undang-Undang tersebut menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung kepada pemerintah desa, yang dikenal sebagai dana desa.

Prioritas pembanguna desa melalui dana desa menggeser pusat tata kelola pemerintahan dari pusat berpindah dan berkembang di daerah. Peningkatan kualitas pelayanan dan percepatan pembangunan serta pertumbuhan daerah menjadi tujuan utama perpindahan tata kelola pemerintahan (Karim et al., 2023). Pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP untuk melakukan pengembangan aplikasi yang dinamakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang diluncurkan pada tahun 2015. Awal kemuculan aplikasi ini dikenal dengan Aplikasi Sistem 'Tata Kelola Keuangan Desa' atau Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa dan saat ini dikenal dengan SISKEUDES. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan alat bantu yang diperuntukkan untuk pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara komputerasasi serta untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang bersih, tertib, efektif dan efisien (Asih & Adiputra, 2022).

Siskeudes yang menjadi alat penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan yang merupakan hasil dari proses akuntansi memiliki peranan penting dalam rangka pertanggungjawaban anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah kepada pemerintah desa. Sebagai alat pertanggungjawaban pemerintah desa, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah desa selama satu periode pelaporan. Informasi yang tersedia dalam laporan keuangan desa menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah desa di periode berikutnya (Milenia et al., 2023).

Mengingat besarnya dana desa yang dikelola setiap tahun, dana desa perlu dikawal dengan baik agar sesuai dengan peruntukannya. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dimaknai sebagai perwujudan kewajiban kepala desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik (Alya Zhafira, 2022).

Banyaknya temuan kasus mengenai pengelolaan dana desa yang dilakukan aparat desa, lalu dibutuhkan satu aturan demi mengurangi ataupun mencegah penyelewengan pengelolaan dana daerah sehingga tercipta suatu tata kelola yang baik dengan prinsip Good Corporate Government yaitu akuntabilitas. Selain perlunya partisipasi dari semua anggota/pegawai yang optimal, adanya cara untuk menanggulangi dan meminimalisir terjadinya persoalan sejenis maka dari itu sangat diperlukan seperti kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparat desa dan kepemimpinan (Krisnawati et al., 2020)

Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diartikan sebagai wujud kewajiban pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pemerintah desa berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa atas seluruh kegiatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan desa kepada publik secara terbuka dan jujur melalui penyajian laporan keuangan secara berkala, yang mana informasi tersebut dapat diakses dan diketahui oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Maryono, 2022).

Permasalahan lain mengenai transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang banyak ditemui adalah transparansi dalam memberikan informasi yang digunakan oleh pemerintah Desa Luk di Kecamatan Rhee, hal tersebut sangat penting diterapkan agar kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Seperti pengertian transparansi yang terbuka seharusnya pemerintah Desa memberikan informasi mengenai rincian dana Desa serta penggunaan Dana Desa secara rutin setiap penerimaan Dana Desa (Sukmawati, 2019).

Penelitian ini dilakukan pada desa kecamatan pringgabaya kabupaten lombok timur, munculnya penelitian ini karena adanya permasalahan yang terjadi pada desa kecamatan pringgabaya dalam proses penganggaran, anggaran dana desa yang diluncurkan pemerintah pusat pada desa kecamatan pringgabaya belum jelas proses penganggarnya disebabkan seringnya perubahan APBDes, sehingga dalam menganggarkan setiap program kerja pemerintah desa selalu berubah-ubah, begitu juga dengan penggunaan sistem keuangan desa masih terjadi hambatan dalam mengaplikasikan SISKEUDES. Penelitian sebelumnya hanya menggambarkan tingkat transparansi pada SISKEUDES, sedangkan pada penelitian ini fokus pada pertanggungjawaban, penggunaan SISKEUDES dan kejelasan sasaran anggaran

Dalam suatu pemerintahan desa, kejelasan sasaran anggaran akan berdampak pada pemaksimalan penggunaan dana yang kemudian aparat desa akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan aparat mengalami kesulitan dalam penyusunan target-target anggaran (Sawitri, 2021)

Stewardship Theory menjelaskan situasi dimana para manajer memiliki tujuan utama untuk organisasi bukan termotivasi dengan tujuan pribadi masing-masing (Donaldson & Davis, 1991). Stewardship theory menggambarkan desa sebagai sebuah pemerintahan yang menjalankan pelayanan publik, tertampungnya aspirasi masyarakat desa, pelayanan yang baik, serta mempertanggungjawabkan dana-dana yang didapatkan dari pemasukan desa.

Perilaku steward dalam mewujudkan target organisasi akan dinilai oleh masyarakat desa, dimana organisasi dalam hal ini desa harus mendahulukan kepentingan yang lebih luas yaitu masyarakat desa, prinsip tersebut menjadi dasar utama bagi stewardship theory (Ajzen, 1991).

Permasalahan terkait masalah transparansi & akuntabilitas pemerintah desa di kecamatan Pringgabaya yakni dengan minimnya pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang disebabkan oleh kemampuan manajerial aparat pemerintah desa yang rendah, adanya informasi yang kabur atau dalam kata lain terjadi kesimpangsiuran informasi dengan aturan yang berlaku mengenai penggunaan anggaran, terjadinya tumpang tindih peraturan dari berbagai pihak yang mempunyai kewenangan terkait aturan pengelolaan keuangan desa, disisi lain juga mengenai partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses mengawasi dan memberikan masukan konstruktif terhadap pemerintah desa juga belum sepenuhnya maksimal, pembuktian terkait hal ini adalah dengan masih adanya temuan dari inspektorat daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

Penelitian yang dilakukan (Yuliastuti et al., 2022) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian internal, dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Balong. Penelitian yang dilakukan (Alfiani, 2021) mengemukakan bahwa analisis regresi linier berganda menunjukkan adanya pengaruh akuntabilitas, transparansi serta sistem akuntansi keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa yang ada di desa Pule, Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.

Penelitian ini mengkaji, sistem informasi keuangan desa, kejelasan sasaran anggaran dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa sekecamatan pringgabaya kabupaten lombok timur. Sedangkan penelitian sebelumnya mengkaji tranparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 75 responden yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan dan badan permusyawaratan desa.

H1: Pengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Salah satu upaya untuk mendukung akuntabilitas dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengeluarkan suatu sistem informasi akuntansi berbasis aplikasi yang dikenal dengan nama SISKEUDES (Sistem Informasi Keuangan Desa). Tujuan dari diimplementasikannya aplikasi SISKEUDES ini yaitu untuk memperlancar proses pelaporan keuangan, untuk mengatur keuangan desa dengan cara yang ideal, dan juga sebagai alat pengendali dalam pengelolaan keuangan desa sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa (Mega et al., 2022). teori stewardship yang terapkan dimana masyarakat mempercayakan kepada pemerintah dalam penyajian laporan keuangan, sehingga diharapkan pemerintah mampu bertindak dan bertanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran untuk kepentingan publik. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientas pada kepentingan masyarakat

serta memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas. Sistem keuangan pada pemerintah desa kecamatan pringgabaya masih memiliki kendala terkait dengan lemahnya akses internet. Hasil penelitian Ayu Wulandari (2022) menemukan bahwa adanya pengaruh positif antara penerapan SISKEUDEB terhadap akuntabilitas dana desa. Hasil penelitian ini juga didukung dengan beberapa hasil penelitian lainnya yaitu Katryn Natania Mega dkk (2022).

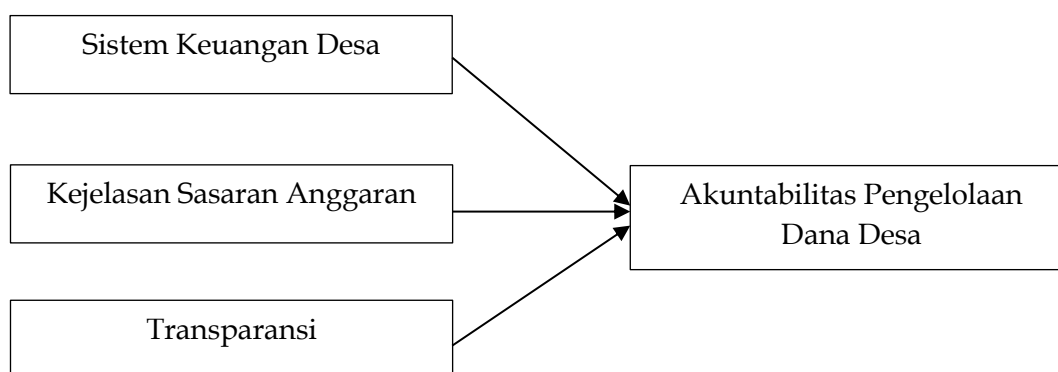
#### H2: Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Untuk pengelolaan dana desa dibutuhkan kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Kenis, 1979). Hal ini akan mendorong karyawan/staf untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki sehingga berimplikasi pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Teori COSO untuk kejelasan sasaran anggaran menggambarkan sejauhmana anggaran ditetapkan secara jelas dan dispesifik agar dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pencapaiannya. Dimana, dengan sasaran anggaran yang jelas dalam suatu organisasi, dapat mempengaruhi kepuasan pelaksana dalam menjalankan tugas. Sehingga, para pelaksana akan memakismalkan kinerjanya untuk mencapai target anggaran yang ditetapkan. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Mantasari, Arianty, dan Fatimah Tahun (2023) dengan hasil penelitian bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Indriaty Ermayani dkk (2024).

#### H3: Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Faktor Lainnya yang bisa menunjang Akuntabilitas Dana Desa yakni transparansi. Transparansi memberikan arti bahwa setiap masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui proses anggaran yang menyangkut kepentingan dan aspirasi masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat yang banyak dalam pengelolaan dana desa (Putra & Rasmini, 2019). Dengan kata lain, transparansi ini dilakukan untuk memberikan penjelasan maupun pertanggung jawaban kepada masyarakat mengenai program dan kebijakan yang telah dilakukan dan/atau sedang dilakukan beserta sumber daya yang digunakan (Mardiasmo, 2012). Sehingga dengan adanya transparansi dapat memungkinkan masyarakat desa mengetahui informasi secara mudah tentang siklus keuangan desa. Teori stewardship menyebutkan bahwa antara steward dan principal terdapat perbedaan, dimana masyarakat merupakan principal yang memiliki hak sepenuhnya atas sejumlah sumber daya yang digunakan oleh pemerintah sedangkan pemerintah berfungsi sebagai steward yang mengemban amanah untuk memanfaatkan sumber daya tersebut untuk kepentingan bersama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ulfi Nella Audia dan Erly Mulyani (2023) bahwa Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Mantasari dkk (2023).





**Gambar 1. Model Penelitian**

*Sumber:* Data Penelitian 2024

### **METODE PENELITIAN**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuesioner (angket). Kuesioner penelitian menggunakan skala likert lima poin. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang. Penelitian ini dilakukan pada kecamatan pringgabaya Kabupaten Lombok Timur karena dari 15 desa di kecamatan pringgabaya masih banyak permasalahan yang terjadi terkait dengan sistem keuangan desa, pertanggungjawaban dana desa yang dikelola. Populasi penelitian adalah seluruh desa yang ada di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. Jumlah populasi sebanyak 126 orang. Sampel dalam penelitian merupakan aparatur pemerintah desa sebanyak 75 orang,. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013: 85). Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, dan BPD.

Kepala desa dipilih karena dia bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. menjalankan tugas di samping berdasarkan kewenangan jabatan, juga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Sekretaris desa mempunyai beban tugas membantu kepala desa di bidang administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat pemerintah desa dan masyarakat. sehingga sekretaris desa akan dimasukkan menjadi sampel. Bendahara desa harus memahami pengelolaan keuangan Desa secara baik dan benar. Sehingga bendahara desa dimasukkan sebagai sampel. BPD juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga melalui beberapa tahap kerja yakni BPD harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa. Maka BPD dimasukkan sebagai sampel.

Definisi operasional variabel Sistem Keuangan Desa merupakan informasi keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan pengawasan keuangan desa secara elektronik terhadap Pengelolaan

Keuangan Desa. Definisi operasional variabel Kejelasan sasaran anggaran mencerminkan sejauh mana sasaran anggaran tersebut dijelaskan secara tegas, spesifik, dan dapat dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab atas pencapaiannya. Kejelasan sasaran anggaran memengaruhi cara perangkat mengalokasikan anggaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah. Kurangnya kejelasan pada sasaran anggaran dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan di antara para pelaksana anggaran saat melaksanakan tugas mereka. Definisi operasional variabel Transparansi merupakan keterbukaan aparat pemerintahan untuk menyampaikan informasi kepada publik mengenai pengelolaan sumber daya publik. Transparansi memberikan arti bahwa setiap masyarakat berhak tahu tentang proses anggaran yang menyangkut kepentingan dana aspirasi masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat yang banyak dalam pengelolaan dana desa. Definisi operasional variabel Akuntabilitas adalah prinsip pertanggung jawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggung jawabkan dari awal hingga akhir sesuai dengan rencana pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam sistem penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dikatakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Skala likert 5 poin digunakan untuk mengukur masing-masing variabel. Kuesioner yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian (Ikhwan Wadi, 2019). Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

$\alpha$  : Konstanta

$\beta$  : Koefisien regresi

$X_1$ : Sistem Keuangan Desa

$X_2$ : Kejelasan Sasaran Anggaran

$X_3$ : Transparansi

e : Standar Error pada tingkat 5%

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan semua variabel memiliki  $r$  hitung yang lebih besar dari  $r$  tabel, pada taraf signifikansi 5% yang artinya item pertanyaan sudah valid. Uji reliabilitas menunjukkan nilai *Cronbach's alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0,60 yang mengindikasikan instrumen penelitian sudah reliabel. Uji normalitas menunjukkan nilai *exact sig.* sebesar 0,433. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang artinya data sudah berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai tolerance dari semua variabel lebih besar dari 0,10 serta nilai *variance inflation factor* (VIF) kurang dari 10, oleh karena itu

mengindikasikan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas pada data. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji Park yaitu menunjukkan bahwa nilai sig. semua variabel lebih besar dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data.

**Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem Keuangan Desa	75	12	20	15,69	1,786
Kejelasan Sasaran Anggaran	75	9	19	13,44	2,440
Transparansi	75	14	30	22,83	2,304
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	75	12	22	18,12	2,073
Valid N (listwise)	75				

Sumber: Data Penelitian 2024

Tabel 1. menunjukkan bahwa variabel sistem keuangan desa ( $X_1$ ) mempunyai nilai minimum 12 dan nilai maksimum 20 dengan nilai rata-rata sebesar 15,69 serta standar deviasi sebesar 1,786 yang lebih kecil dari nilai rata-rata, yang artinya data kurang bervariasi. Nilai minimum variabel kejelasan sasaran anggaran ( $X_2$ ) adalah 9 sedangkan nilai maksimum adalah 19, dengan nilai rata-rata sebesar 13,44 sertastandar deviasi sebesar 2,440 yang lebih kecil dari nilai rata-rata, yang artinya data kurang bervariasi. Nilai minimum variabel transparansi adalah 14 sedangkan nilai maksimum adalah 30, dengan nilai rata-rata sebesar 22,83 sertastandar deviasi sebesar 2,304 yang lebih kecil dari nilai rata-rata, yang artinya data kurang bervariasi. Nilai minimum variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa ( $Y$ ) adalah 12 sedangkan nilai maksimum sebesar 22 dengan nilai rata-rata sebesar 18,12 sertastandar deviasi sebesar 2,073 yang lebih kecil dari nilai rata-rata, yang artinya data kurang bervariasi.

**Tabel 2 Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Rule of Thumb	Keterangan
Sistem Keuangan Desa	0,875	0,7	Reliabel
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,756	0,7	Reliabel
Transparansi	0,846	0,7	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,724	0,7	Reliabel

Sumber: Data Penelitian 2024

Berdasarkan tabel 2, nilai *Cronbach Alpha* lebih tinggi dari pada *Composite Reability* sebesar 0,7 dan sudah dikatakan reliabel,



**Tabel 3. Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	6,534	2,442	2,676	0,009
Sistem Keuangan Desa	0,276	0,135	2,044	0,045
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,257	0,192	2,497	0,012
Transparansi	0,237	0,103	2,296	0,025

Sumber: Data Penelitian 2024

Persamaan analisis regresi moderasi penelitian ini sebagai berikut

$$Y = 6,534 + 0,276X_1 + 0,257X_2 + 0,237 X_3 + e \dots\dots\dots(1)$$

Interpretasi persamaan tersebut sebagai berikut:

Konstanta sebesar 6,534 memiliki arti bahwa apabila sistem keuangan desa ( $X_1$ ); kejelasan sasaran anggaran ( $X_2$ ); dan transparansi ( $X_3$ ); bernilai 0 maka akuntabilitas pengelolaan dana desa ( $Y$ ) bernilai 0,6,534. Koefisien regresi variabel  $X_1$  sebesar 0,276 memiliki arti setiap peningkatan sistem keuangan desa ( $X_1$ ) sebesar 1 satuan, dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap, akan menyebabkan peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa ( $Y$ ) sebesar 0,276. Koefisien regresi  $X_2$  sebesar 0,257 memiliki arti bahwa setiap peningkatan kejelasan sasaran anggaran ( $X_2$ ) sebesar 1 satuan, dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap, akan menyebabkan peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana ( $Y$ ) sebesar 0,137. Koefisien regresi transparansi sebesar 0,237 memiliki arti bahwa setiap peningkatan transparansi sebesar 1 satuan, dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap, akan menyebabkan peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana ( $Y$ ) sebesar 0,237.

Variabel sistem keuangan desa memiliki nilai  $b$  sebesar 0,276 dengan nilai signifikasni sebesar 0,045 yang lebih kecil dari 0,05 artinya sistem keuangan desa berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa se Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. Sistem keuangan dapat meminimalisir penyelewengan dana desa dan meningkatkan pengelolaan dana desa. Implementasi sistem keuangan desa yang lebih baik mendorong tanggung jawab dana lokal. Berdasarkan fakta empiris yang diperoleh dengan menyebarkan kuisioner di desa-desa di kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur membuktikan bahwa sistem keuangan desa dalam hal pembuatan laporan pertanggungjawaban dengan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa dapat membuat buku laporan dan membentuk pengetahuan. informasi dasar penerapan sistem keuangan desa dan dapat membuat laporan di dunia nyata. Penelitian ini sejalan dengan (Milenia, 2023) mengemukakan bahwa siskeudes dilihat dari indikator kesesuaian informasi yang diminta dalam template/program, kesesuaian jenis laporan, ketepatan dan kepastian waktu pelaporan, kesesuaian persyaratan, prosedur, dan tahapan pelaporan, dan umpan balik (feedback) dapat dikatakan sudah efektif. Kemudian mengenai akuntabilitas laporan keuangan desa dilihat dari indikator akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal, bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah

desa secara vertikal dan horizontal dapat dikatakan sudah baik atau sudah akuntabel, meskipun masih terdapat kendala yaitu berkaitan dengan kecukupan atau kelengkapan SPJ (surat pertanggungjawaban) pada saat pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah Desa. Penelitian ini sejalan dengan (Karim, 2023) dan (Harafonna, 2019) mengemukakan bahwa Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai  $b$  sebesar 0,257 dengan nilai signifikasni sebesar 0,012 nilai ini lebih kecil dari 0,05 artinya kejelasan sasaran anggaran berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa. Hal ini berarti bahwa semakin baik kejelasan sasaran anggaran maka akan menyebabkan meningkatnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Teori agensi menjelaskan akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah dalam hal ini kepala desa dan aparatur desa untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan dana desa kepada pihak masyarakat sebagai prinsipal. Dengan sasaran anggaran yang jelas maka akan mempermudah pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana sehingga mendorong terjadinya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini sejalan dengan (Sawitri, 2021), (Luh Komang, 2024) dan (Krisnawati, 2020) mengemukakan bahwa kejelasan sasaran anggaran mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan arah positif. Artinya, semakin tinggi tingkat kejelasan sasaran anggaran dalam pengelolaan dana desa maka semakin tinggi pula akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.

Variabel transparansi memiliki nilai  $b$  sebesar 0,237 dengan nilai signifikansi sebesar 0,025 nilai ini lebih kecil dari 0,05 artinya transparansi berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin baik transparansi keuangan desa akan memberikan dampak positif pada pertanggung jawaban keuangan desa. Transparansi pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Salah unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan adanya transparansi sehingga terciptanya pertanggungjawaban keuangan desa yang baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori stewardship yang didesain agar steward selaku pihak pemegang amanah dapat bertindak untuk kepentingan publik dan tidak termotivasi untuk bertindak sesuai dengan tujuan individu. Dari teori ini menjelaskan dengan adanya keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat maka akan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Sehingga peran keterbukaan sangat penting dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Penelitian ini tidak sejalan dengan (Ikhwan Wadi, 2019), (Yuliasuti, 2022) dan (Putri, 2022) mengemukakan bahwa transparansi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas keuangan desa di Kabupaten Lombok timur. Artinya akses untuk mendapatkan informasi, dan keterbukaan anggaran pemerintah desa memberikan

dampak negatif terhadap terciptanya akuntabilitas keuangan desa ini dikarenakan laporan anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDes) banyak yang tidak sesuai dengan hasil musyawarah rencana pembangunan desa (MUSRENBANGDes), rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) sampai ke APBDes sehingga antara keterbukaan anggaran dengan pertanggung jawaban mempunyai dampak negatif di Kabupaten Lombok Timur.

## SIMPULAN

Simpulan yang dapat diperoleh berdasarkan hasil penelitian adalah sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Keterbatasan penelitian ini adalah terdapat variabel di luar model penelitian, sehingga pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain di luar model penelitian ini.

Adapun saran yang meliputi sistem keuangan desa terus mempermudah akses agar terciptanya transparansi keuangan desa dengan baik, sehingga setiap proses penganggaran di pemerintah desa agar bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa.

## REFERENSI

- Alfiani, A., & Estiningrum, S. D. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(2), 222. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i2.36125>.
- Alya Zhafira<sup>1</sup>, Maya Febrianty Lautania<sup>2</sup>, A. Y. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dan Faktor Yang Mempengaruhinya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 7(1), 131-143.
- Ariani, Nita. 2019. "Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi, Kemampuan Teknik Pemakai, Dukungan Manajemen, Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara.
- Asih, K. G., & Adiputra, I. M. P. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Versi 2.0.3 Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13(1), 12-23.
- Fani Dkk, 2015. Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi, Kemampuan Teknik Pemakai, Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi (Studi Empiris Pada PT PLN (Persero) Area Bali Utara (Kantor Pusat). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Granell, Ximo. 2014. *Multilingual Information Management: Information, Technology And Translators*. Oxford: Chandos Publishing.
- Ishnainy A. K. 2015. Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi, Partisipasi Manajemen, Dan Kemampuan Pemakai Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individu (Studi Pada PT. Kereta Api Indonesia Persero Bandung).

- Karim, A. E., Blongkod, H., & Husain, S. P. (2023). Pengaruh Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal Of Economic, Bussines And Accounting (COSTING)*, 7(1), 130-136. <https://doi.org/10.31539/Costing.V7i1.5963>.
- Krisnawati, L. A., Yuniarta, G. A., & Sulindawati, N. L. G. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparaturdesa Dan Kepemimpinan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tampaksiring. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(2), 1-11.
- Luh Komang Purnama Sari, Kadek Dewi Padnyawati, & Rai Dwi Andayani W. (2024). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi April 2024*, April, 158-167.
- Milenia, H. A., Effendy, L., & Nurabiah, N. (2023). Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 7(2), 67-81. <https://doi.org/10.22437/Jaku.V7i2.18494>.
- Putri, A. R. L., & Maryono. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1668-1688.
- Sawitri, P. I., & Gayatri, G. (2021). Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Dan Kompetensi Perangkat Desa Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(2), 476. <https://doi.org/10.24843/Eja.2021.V31.I02.P17>.
- Sulistyowati, R., & Nataliawati, R. (2022). Analisis Akuntabilitas , Transparansi , Dan Partisipasi. *Owner Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1798-1811. <http://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/819>.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa ( Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut ). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2(1), 52-66.